

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2007, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005).
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Arief, Barda Nawawi. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Artidjo Alkostar, Memperkaya Diri Secara Tidak Sah (Illicit Enrichment) Dan Memperdagangkan Pengaruh (Trading Influence).
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Bambang Waluyo, 2016, Pemberantasan Tindak pidana korupsi (Strategi dan Optimalisasi),
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, (Sinar Grafika, 2015).
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana 2008).
- Djoko Sumaryanto, Buku Ajar Hukum Pidana, (Surabaya: Ubhara Press, 2019)
- Eggi Sudjana, 2008, Republik Tanpa KPK, JP Bokks, Yogyakarta.

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, Tindak pidana korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Gustav Radbruch, Legal Philosophy, in The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1950).

H. Baharuddin Lopa dan Moh.Yamin, Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi (UU Nomor 3 Tahun 1971), Alumni, Bandung, 1987.

H. Muchsin, 2006, Ikhtisar Ilmu Hukum, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.

Hans Otto Sano, et.al, 2003, Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban, (alih bahasa oleh Rini Adriati), DepKumHam, Jakarta.

Haryono Umar, Corruption The Devil (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016).

J.E Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, (Bandung: Citra Aditya, 2007).

K.P Henry Indraguna dan Kayaruddin Hasibuan, Memahami Tafsir Pasal Tindak pidana korupsi, (Jakarta Timur, Tras Media: 2020).

Kristian & Dr. Yopi Gunawan, 2015, Tindak pidana korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations

- Convention Against Corruption (UNCAC), PT Refika Aditama, Bandung.
- Malcom Waters dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008. Teori Hukum, Rafika Aditama, Bandung.
- Mansur Kartayasa, Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia, Kencana, Jakarta, 2017.
- Mansyur Semma, Negara dan Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Mochtar Lubis & James C. Scott, 1995, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni Wayan Sinaryati, Fungsi Jaksa dalam menuntut terdakwa korupsi untuk pengembalian kerugian keuangan negara perspektif sistem peradilan pidana indonesia, Vol. 4 No. 1, 2015.
- Nyoman, Sarikat Putra Jaya, Kapita Selecta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005.
- P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Rasyid Ariman dkk, Kebijakan Kriminal, (Palembang: Penerbit Unsri, 2008).
- S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1991).

Soejono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, (Yogyakarta, UII Press, 1983).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI-Press, 2015).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan 3, (Jakarta: UI-Press., 2008).

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 2003).

Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta.

Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar, (Bandung: Alumni, 1982).

Yovita A Mengesti & Bernard L, Tanya Moralitas Hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

Yudi Kristiana, 2016, Pemberantasan Tindak pidana korupsi Perspektif Hukum Progresif.

B. JURNAL

Guntur Hamzah, makalah “Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun). Disampaikan pada Seminar Sehari dalam rangka HUT Peradilan Tata Usaha Negara ke-26 dengan tema: Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-

Undang Administrasi Pemerintahan, kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun, yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Jakarta, 26 Januari 2016.

Romli Atmasasmita, Penyalahgunaan Wewenang oleh Penyelenggara Negara:

Suatu Catatan Kritis atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Dihubungkan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka H.U.T. IKAHI Ke-62 dengan tema UndangUndang Administrasi Pemerintahan, Memperkuat atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi, Hotel Mercure, Ancol Jakarta, tanggal 26 Maret 2015.

Sidharta, Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, PUSHAM UII, dan Norsk Senter For Menneskerettigheter Norwegian Centre For Human Rights, Hotel Grand Angkasa Medan, tanggal 2-5 Mei 2011.

Susilawati, Syarifuddin, M. Aditya Farhan Nasution, Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Sumatera Utara

Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Al-Hikmah Vol. 3, No. 4, Desember 2022.

Yulius, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), Artikel dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015.

C. INTERNET

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140

dan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

